



# LAPORAN KINERJA 2024

**KPP PRATAMA SINTANG**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN BARAT  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINTANG**



**LAPORAN KINERJA  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Om swastyastu,  
Namo buddhaya,  
Salam kebajikan.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkarya melanjutkan perjuangan mengamankan penerimaan negara demi keberlangsungan Republik Indonesia.

Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sintang mengemban amanah target penerimaan pajak sebesar Rp1.132.483.004.000. Dari target tersebut, KPP Pratama Sintang berhasil mengumpulkan Rp1.136.683.003.865, 100,37% dari target tahun 2024. Penerimaan pajak tahun 2024 sekaligus menjadi penanda tercapainya target penerimaan pajak selama lima tahun terakhir (quintrick penerimaan pajak). Keberhasilan penerimaan ini didukung oleh kerja keras seluruh pegawai KPP Pratama Sintang.

KPP Pratama Sintang berkomitmen menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) guna menggambarkan pencapaian kinerja KPP Pratama Sintang. Hal ini dilakukan sebagai wujud transparansi informasi dan pertanggungjawaban atas hasil kerja dan pelaksanaan program/kegiatan KPP Pratama Sintang serta digunakan untuk bahan evaluasi kinerja agar dapat tetap tangguh menghadapi tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang.

Salam sehat,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Om santi santi om.

Sintang, 31 Januari 2025  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Sintang



Ditandatangani secara elektronik  
S. Sentot Wardoyo



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	I
<b>DAFTAR ISI</b> .....	II
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	1
C. Sistematika Laporan .....	2
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	4
A. Perencanaan Strategis .....	4
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	5
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	8
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	8
1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal .....	8
2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi .....	12
3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi .....	14
4. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif .....	15
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif .....	16
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif .....	17
7. Penegakan hukum yang efektif .....	19
8. Data dan Informasi yang Berkualitas .....	21
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif .....	23
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel .....	25
B. Realisasi Anggaran .....	26
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	26
D. Kinerja Lain-Lain .....	27
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	28
A. Kesimpulan .....	28
B. Langkah selanjutnya .....	28
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	30
A. Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Sintang Tahun 2024 .....	30
B. Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Sintang Tahun 2024 .....	30
C. Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Sintang Tahun 2023 .....	30

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laporan Kinerja KPP Pratama Sintang Tahun 2024 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPP Pratama Sintang atas penggunaan anggaran. Dalam Laporan Kinerja ini akan disampaikan pengukuran kinerja dan evaluasi terhadap pengukuran kinerja, untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh KPP Pratama Sintang.

Dalam dokumen Renstra Kementerian Keuangan tahun 2020-2024, disebutkan bahwa terdapat beberapa permasalahan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permasalahan dalam penerimaan pajak masih timbul akibat administrasi perpajakan yang belum optimal, rendahnya pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan serta FTAs, regulasi pemajakan atas perdagangan melalui transaksi elektronik yang belum rampung, basis data transaksi digital yang belum tersedia, serta pandemi Covid-19 yang melanda dunia berdampak menurunnya penerimaan negara. Pada tahun 2020-2024, di samping permasalahan pada fungsi penerimaan yang diamanahkan oleh Kementerian Keuangan, DJP juga memiliki permasalahan internal berupa tantangan Transformasi Kelembagaan, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), dan pengembangan teknologi informasi. Dengan adanya Laporan Kinerja ini diharapkan KPP Pratama Sintang terus melakukan upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya di tengah tantangan yang harus dihadapi.

### **B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sintang merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah naungan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat yang beralamat di Jalan PKP Mujahidin Nomor 3-6, Tanjung Puri, Sintang. KPP Pratama Sintang memiliki tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangya berdasarkan peraturan perundang-undangan. KPP Pratama Sintang juga merupakan salah satu dari 160 unit vertikal Kementerian Keuangan yang ditetapkan sebagai unit kerja di tempat yang sulit perhubungannya atau *remote* berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-877/KMK.01/2018 tentang Unit Kerja Kementerian Keuangan di Tempat yang Sulit Perhubungannya. Wilayah kerja KPP Pratama Sintang meliputi 3 (tiga) kabupaten dengan

total luas 62.120 km<sup>2</sup> yaitu Kabupaten Sintang 21.638 km<sup>2</sup>, Kabupaten Kapuas Hulu 29.842 km<sup>2</sup>, dan Kabupaten Melawi 10.640 km<sup>2</sup>. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan dan penyuluhan, KPP Pratama Sintang dibantu oleh 2 (dua) unit Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yaitu KP2KP Putussibau yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu dan KP2KP Nangapinoh yang berada di Kabupaten Melawi.

Terkait sumber daya manusia, per 31 Desember 2024 KPP Pratama Sintang memiliki 76 pegawai yang berdasarkan jabatan terdiri dari Pejabat Eselon III 1 orang, Pejabat Eselon IV 11 orang, Fungsional Pemeriksa Pajak 5 orang, Fungsional Penilai Pajak 1 orang, Fungsional Penyuluh Pajak 2 orang, *Account Representative* 21 orang, Sekretaris 1 orang, Bendahara 1 orang, Juru Sita Pajak 2 orang, dan Pelaksana 31 orang.

Adapun komposisi Wajib Pajak (WP) di KPP Pratama Sintang dapat dilihat pada tabel berikut:

#### **Komposisi Wajib Pajak KPP Pratama Sintang**

JENIS WAJIB PAJAK	AKTIF	NON EFEKTIF	AKTIVASI SEMENTARA	TOTAL
BADAN	8.446	8.761	305	14.512
ORANG PRIBADI	52.060	128.988	12	181.060
INSTANSI PEMERINTAH	1.130	3	83	1.216
<b>TOTAL</b>	<b>58.636</b>	<b>137.752</b>	<b>400</b>	<b>196.788</b>

Sumber: SIDJP

Dari total Wajib Pajak sejumlah 196.788, terdapat 137.752 Wajib Pajak Non Efektif dan 400 Wajib Pajak Aktivasi Sementara sehingga jumlah Wajib Pajak yang dapat dilakukan penggalian potensi perpajakan melalui proses intensifikasi sebesar 58.636 Wajib Pajak. Jumlah tersebut terdiri atas 52.060 Wajib Pajak Orang Pribadi, 8.446 Wajib Pajak Badan, dan 1.130 Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

### **C. Sistematika Laporan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPP Pratama Sintang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### **1. Bab I. Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

## 2. Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perencanaan Strategis yang menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang merangkum proses penyusunan serta penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2024.

## 3. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada sub bab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024.

### D. Kinerja Lain-Lain

Pada sub bab ini diuraikan penghargaan yang diraih KPP Pratama Sintang selama tahun 2024.

## 4. Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Terdapat 3 (tiga) tujuan yang ditetapkan dan hendak dicapai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sepanjang 2020 sampai dengan 2024, yakni:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal;
3. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien.

Perincian tujuan tersebut tertuang dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024. Hendak dicapainya tujuan ini guna mewujudkan visi dan misi DJP sekaligus menyelaraskan dengan tujuan Kementerian Keuangan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan untuk tahun 2020-2024.

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

- a. Rasio Perpajakan terhadap PDB.

Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional, DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.

- b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*Core tax administration system*).

DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

KPP Pratama Sintang memberikan kontribusinya dalam usaha mewujudkan tujuan DJP melalui kegiatan yang dapat menunjang tercapainya optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan dengan berpedoman pada visi, misi, motto, dan slogan sebagai berikut :

#### **Visi**

Menjadi Kantor Pelayanan Terbaik di Kalimantan Barat

#### **Misi**

Memberikan Pelayanan Terbaik dalam Menyelenggarakan Fungsi Administrasi Perpajakan dengan Menerapkan Undang-Undang Perpajakan Secara Adil dalam Rangka Membiayai Penyelenggaraan Negara Demi Kemakmuran Rakyat

### Motto

**SIMPATIK** (Senyum, Impresif, Prima, Akurat, Informatif, Ikhlas)

### Slogan

**JUARA** (Jujur, Amanah, Berintegritas)

#### B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maka Sasaran Strategis KPP Pratama Sintang merupakan turunan dari Sasaran Strategis DJP yang tercantum dalam dokumen Renstra DJP Tahun 2020-2024. Secara garis besar Sasaran Strategis terbagi atas Sasaran Penerimaan dan Sasaran Pendukung Penerimaan Pajak yang meliputi *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning & Growth Perspective*.

Adapun Perjanjian Kinerja KPP Pratama Sintang untuk tahun 2024 yang meliputi keseluruhan sasaran strategis tersebut adalah sesuai dengan tabel berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINTANG  
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN BARAT  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%

		4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan penilaian	100%
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang optimal	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan. KPP Pratama Sintang telah menyampaikan Nota Dinas Nomor ND-726/KPP.1306/2024 tanggal 30 Agustus 2024 hal Penyampaian Masukan Refinement Peta Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Individu (IKU/IKI) Unit Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025 kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak. Dalam lampiran nota dinas tersebut KPP Pratama Sintang mengusulkan perubahan Manual IKU untuk IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan

Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM serta usulan IKU baru yakni Produktivitas Penerbitan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

##### 1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

Sesuai dengan sasaran penerimaan pajak negara yang optimal, KPP Pratama Sintang memegang peranan penting dalam mencapai penerimaan pajak yang sudah tercantum dalam APBN maupun APBN-P. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui capaian penerimaan pajak sebagai berikut:

Persentase realisasi penerimaan pajak							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	21,08%	47,10%	47,10%	74,45%	74,45%	100%	<b>100%</b>
<b>Realisasi</b>	14,53%	38,42%	38,42%	61,86%	61,86%	100,37%	<b>100,37%</b>
<b>Capaian</b>	68,9	81,6	81,6	83,09	83,09	100,37	<b>100,37</b>

Sumber : Mandor

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP. Formula dari IKU Persentase realisasi penerimaan pajak adalah realisasi penerimaan pajak dibagi target penerimaan pajak kemudian dikali 100%.

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp1.136.683.003.865 atau 100,37% dari target tahun 2024 sebesar Rp1.132.483.004.000. Kinerja capaian penerimaan pajak tahun 2024 ini mengalami penurunan dari capaian tahun 2023 sebesar 105,94%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian persentase realisasi penerimaan pajak nasional (100,46), capaian persentase realisasi penerimaan

pajak KPP Pratama Sintang (100,37) sedikit lebih rendah dengan selisih 0,09. Berdasarkan data pembayaran, capaian persentase realisasi penerimaan pajak selama empat tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak				
Tahun	2021	2022	2023	2024
Target	Rp818.452.272.000	Rp968.207.591.000	Rp1.029.948.122.000	Rp1.132.483.004.000
Realisasi	Rp978.763.311.648	Rp1.073.894.804.774	Rp1.091.090.162.709	Rp1.136.683.003.865
Capaian	119,59%	110,91%	105,94%	100,37%

Sumber: Appportal

Berdasarkan tabel di atas, capaian penerimaan pajak pada tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023 namun nominalnya meningkat. Nominal penerimaan pajak mengalami peningkatan dari Rp978.763.311.648 (2021), Rp1.073.894.804.774 (2022), Rp1.091.090.162.709 (2023), dan Rp1.136.683.003.865 (2024).

Adapun detail capaian penerimaan pajak netto tahun 2024 beserta pertumbuhannya ditampilkan dalam tabel berikut:

**a. Per Jenis Penerimaan Pajak**

JENIS PAJAK	NETTO 2023	NETTO 2024	PERTUMBUHAN NETTO	
			NOMINAL	PERSENTASE
PPN dan PPnBM	Rp 674.718.642.945	Rp 691.949.036.127	Rp 17.230.393.182	2,55%
PPh Non Migas	Rp 323.011.950.325	Rp 336.171.591.414	Rp 13.159.641.089	4,07%
PBB dan BPHTB	Rp 81.742.204.941	Rp 96.108.230.878	Rp 14.366.025.937	17,57%
Pendapatan atas PL dan PIB	Rp 11.296.547.874	Rp 12.438.071.209	Rp 1.141.523.335	10,11%
PPh Migas	Rp -44.675.402	Rp 2.477.500	Rp 47.152.902	105,55%
<b>TOTAL</b>	Rp 1.091.090.152.709	Rp 1.136.669.407.128	Rp 45.579.254.419	4,18%

Sumber: Appportal

Kinerja penerimaan pajak tahun 2024 pertumbuhannya 4,18% atau lebih tinggi Rp45.579.254.419 dibandingkan penerimaan tahun sebelumnya. PPh Migas adalah jenis pajak dengan persentase pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 105,55% diikuti oleh PBB dan BPHTB dengan pertumbuhan 17,57%, Pendapatan atas PL dan PIB dengan pertumbuhan 10,11%, PPh Non Migas dengan pertumbuhan 4,07%, dan PPN dan PPnBM dengan pertumbuhan 2,55%.

## b. Per Sektor Penentu Penerimaan

SEKTOR	NAMA SEKTOR	2023			2024		
		Penerimaan	Peranan	Growth	Penerimaan	Peranan	Growth
C	Industri Pengolahan	253,105,377,783	23.43%	-1.54%	263,491,666,158	23.18%	4.10%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	255,652,820,870	23.20%	4.82%	263,322,275,916	23.17%	3.00%
O	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	242,456,449,313	22.22%	31.73%	242,983,411,363	21.38%	0.22%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	154,859,682,910	14.19%	-24.96%	142,884,015,116	12.57%	-7.73%
H	Transportasi dan Pergudangan	61,950,998,801	6.61%	-12.01%	122,978,278,080	10.82%	98.51%
	Di luar sektor CAOGH	123,064,823,032	10.35%	9.76%	101,009,760,495	8.89%	-17.92%
<b>TOTAL</b>		<b>1,091,090,152,709</b>	<b>100%</b>	<b>1.60%</b>	<b>1,136,669,407,128</b>	<b>100%</b>	<b>4.18%</b>

Sumber: Apportal

Dari tabel di atas terlihat bahwa Industri Pengolahan, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib, serta Perdagangan Besar Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor yang mengalami perubahan negatif dalam hal peranan.

Namun hal ini tidak berlaku untuk sektor Transportasi dan Pergudangan terjadi kenaikan dalam hal peranan dari 6,61% menjadi 10,82%. Untuk pertumbuhannya juga meningkat 98,51%. Seluruh sektor kecuali Perdagangan Besar Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor juga mengalami peningkatan dalam hal penerimaan.

## c. Per Wilayah Kabupaten

JENIS PAJAK	SINTANG		
	2023	2024	Growth
PPN dan PPnBM	Rp 386.017.568.681	Rp 351.824.819.907	-8.86%
PPh Non Migas	Rp 193.473.199.961	Rp 211.583.719.781	9.36%
PBB dan BPHTB	Rp 42.822.920.847	Rp 50.956.295.319	18,99%
Pendapatan atas PL dan PIB	Rp 11.285.952.729	Rp 11.638.715.202	3,13%
PPh Migas	Rp -44.675.402	Rp 175.000	100,39%
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 633.742.944.380</b>	<b>Rp 626.003.725.209</b>	<b>-1,22%</b>

JENIS PAJAK	MELAWI		
	2023	2024	Growth
PPN dan PPnBM	Rp 139.329.966.159	Rp 158.308.509.434	13,62%
PPh Non Migas	Rp 45.217.045.698	Rp 47.278.156.568	4,56%
PBB dan BPHTB	Rp 14.076.189.247	Rp 20.953.860.506	48,86%
Pendapatan atas PL dan PIB	Rp 350.000	Rp 783.408.337	223.730,96%
PPh Migas	Rp -	Rp 2.302.500	100%
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 198.668.926.722</b>	<b>Rp 227.326.237.345</b>	<b>14,42%</b>

JENIS PAJAK	KAPUAS HULU				
	2023		2024		Growth
PPN dan PPnBM	Rp	149.234.394.284	Rp	181.156.116.669	21,39%
PPh Non Migas	Rp	84.182.516.298	Rp	87.321.096.815	3,73%
PBB dan BPHTB	Rp	23.208.538.788	Rp	22.899.080.203	-1,33%
Pendapatan atas PL dan PIB	Rp	10.245.145	Rp	15.947.670	55,66%
PPh Migas	Rp	-	Rp	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>Rp</b>	<b>256.767.398.359</b>	<b>Rp</b>	<b>291.392.241.357</b>	<b>13,48%</b>

Sumber: Apportal

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Kabupaten Melawi mengalami pertumbuhan penerimaan pajak paling besar yaitu sebesar 14,42%, sedangkan Kabupaten Kapuas Hulu mengalami pertumbuhan sebesar 13,48%. Kabupaten Sintang mengalami penurunan penerimaan pajak sebesar 1,22%.

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	100	100	100	100	100	100	<b>100</b>
<b>Realisasi</b>	78,86	83,58	83,58	88,44	88,44	94,22	<b>94,22</b>
<b>Capaian</b>	78,86	83,58	83,58	88,44	88,44	94,22	<b>94,22</b>

Sumber : Mandor

IKU selanjutnya adalah indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dengan formula 50% indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto ditambah 50% indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui 60% komponen pertumbuhan nasional ditambah dengan 40% komponen pertumbuhan unit. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Sedangkan komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen. Penyebab indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tidak mencapai 100% dikarenakan terjadi penurunan setoran PPN khususnya untuk KLU

perkebunan sawit dan industri CPO serta terdapat kesalahan proyeksi perencanaan kas pada bulan Februari 2024.

Penurunan capaian penerimaan pajak KPP Pratama Sintang sangat dipengaruhi oleh berkurangnya setoran pajak yang diakibatkan oleh perpindahan Wajib Pajak ke luar wilayah kerja KPP Pratama Sintang, pemusatan kewajiban PPN ke luar wilayah kerja KPP Pratama Sintang, dan restitusi pajak yang cukup besar.

Untuk mengatasi hal tersebut, KPP Pratama Sintang telah berusaha mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperluas basis penerimaan pajak, dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak terhadap Wajib Pajak lain yang bergerak di luar bidang komoditas sawit, baik melalui jalur himbauan kewajiban perpajakan (SP2DK) yang dilakukan oleh *Account Representative* (AR) maupun jalur pemeriksaan khusus Wajib Pajak yang dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak (FPP). Selama tahun 2024, AR telah menerbitkan dan menindaklanjuti 910 SP2DK.

Salah satu kegiatan yang dilakukan sebagai bagian dari intensifikasi perpajakan adalah melakukan bedah WP yang dihadiri oleh para AR dan FPP untuk menggali ide-ide dalam penggalian potensi pajak dan menggali lebih lanjut potensi yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Melalui bedah WP diharapkan dapat diperoleh sudut pandang atau ide lain yang dapat direalisasikan menjadi potensi pajak.

Di samping cara tersebut, KPP Pratama Sintang juga telah melakukan berbagai edukasi dan persuasi kepada Wajib Pajak dan/atau masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berbagai kegiatan penyuluhan dan *Business Development Service* dikemas untuk mencapai sasaran tersebut.

Terkait deviasi proyeksi perencanaan kas, KPP Pratama Sintang telah berupaya melakukan proyeksi perencanaan kas yang lebih akurat setiap triwulan dan berkomunikasi dengan seksi terkait sehubungan dengan setoran yang tidak muncul di masa sebelumnya.

## 2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dilihat dari tingkat pembayarannya. Sedangkan Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dilihat dari tingkat pelaporan SPT Tahunan dari Wajib Pajak yang bersangkutan selama Tahun 2024.

Capaian sasaran strategis kepatuhan tahun berjalan yang tinggi adalah sebagai berikut:

<b>Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)</b>							
<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Sm.1</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d. Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Yearly</b>
<b>Target</b>	21,08%	47,10%	47,10%	74,45%	74,45%	100%	<b>100%</b>
<b>Realisasi</b>	14,62%	35,27%	35,27%	60,88%	60,88%	100,35%	<b>100,35%</b>
<b>Capaian</b>	69,35	74,88	74,88	81,77	81,77	100,35	<b>100,35</b>
<b>Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi</b>							
<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Sm.1</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d. Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Yearly</b>
<b>Target</b>	60%	80%	80%	90%	90%	100%	<b>100%</b>
<b>Realisasi</b>	69,40%	100,29%	100,29%	113,75%	113,75%	120,85%	<b>120,85%</b>
<b>Capaian</b>	115,67	120	120	120	120	120	<b>120</b>

Sumber : Mandor

Target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak. Formula dari IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan (PPM) adalah realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM dibagi target penerimaan pajak dari kegiatan PPM kemudian dikali 100%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan demi mencapai IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan (PPM) yakni menerbitkan surat himbauan untuk klarifikasi penurunan setoran Wajib Pajak, melakukan kunjungan kerja (*visit*) terhadap Wajib Pajak yang mengalami penurunan penerimaan untuk memastikan penyebab terjadinya penurunan setoran Wajib Pajak dan menuangkan dalam kertas kerja, melakukan analisis penurunan Wajib Pajak dan mengambil langkah untuk pengamanan penerimaan pada triwulan selanjutnya, melakukan identifikasi supplier Wajib Pajak khususnya WP Industri CPO yang ada di KPP Pratama Sintang namun NPWP Pemasok terdaftar di luar KPP Pratama Sintang, serta mencari data detil faktur perusahaan yang melakukan pembelian TBS dari luar Sintang, dan melakukan komunikasi persuasif kepada Wajib Pajak.

Di samping itu, Kepatuhan Tahun Berjalan yang tinggi diukur berdasar tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Tahun 2024 dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, meningkatkan jumlah basis pembayar pajak, serta meningkatkan pertumbuhan pembayaran pajak. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu

Tantangan pemenuhan IKU Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan yaitu terdapat Wajib Pajak yang sulit dilakukan komunikasi karena letak geografisnya di wilayah yang tidak terdapat jaringan internet. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan koordinasi dengan KP2KP dan perangkat desa terkait asistensi pelaporan SPT Tahunan dan langsung menghimbau Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan.

Dari target SPT tahun 2024 sejumlah 58.890, SPT yang telah dilaporkan dan masuk ke data sejumlah 64.600 sehingga diperoleh capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 120,85%. Sedangkan persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 adalah sebesar 100,35% atau 1.042.198.561.209 dari target yang telah ditetapkan yaitu 1.038.566.182.000.

### 3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	<b>100,00%</b>
<b>Realisasi</b>	14,89%	69,20%	69,20%	70,91%	70,91%	100,56%	<b>100,56%</b>
<b>Capaian</b>	59,56	120	120	94,55	94,55	100,56	<b>100,56</b>

Sumber : Mandor

Kegiatan PKM (Pengujian Kepatuhan Material) adalah rangkaian kegiatan pengujian kepatuhan terhadap Wajib Pajak atas pelaporan dan pembayaran sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan, ekstensifikasi, pemeriksaan dan penagihan yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan. Prioritas Kegiatan PKM terdiri dari kegiatan sasaran antara lain analisis atas kegiatan pengawasan

pembayaran dan pelaporan, analisis angsuran masa, analisis data *matching*, dan analisis pengawasan fasilitas. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 adalah sebesar 100,56% atau 94.443.442.656 dari target yang telah ditetapkan yaitu 93.916.822.000.

Aksi yang telah dilakukan dalam upaya mencapai target IKU tersebut adalah dengan mempercepat tindak lanjut DSP4 semester 1 2024, menindaklanjuti DPP outstanding, mengajukan DPP mandatori semester 1 yang lebih berkualitas, menindaklanjuti data AEOI, faktur pajak pembelian 00, ILAP dan Wajib Pajak non efektif terdapat data pemicu, melakukan pengawasan Wajib Pajak bendahara desa yang tingkat kepatuhan pembayarannya hanya sebesar 50%, serta percepatan tindakan pemeriksaan dan penagihan.

#### 4. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Capaian sasaran strategis edukasi dan pelayanan yang efektif adalah sebagai berikut:

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	10%	40%	40%	60%	60%	74,0%	<b>74,0%</b>
<b>Realisasi</b>	36,67%	49,73%	49,73%	66,92%	66,92%	88,80%	<b>88,80%</b>
<b>Capaian</b>	120	120	120	112	112	120	<b>120</b>
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	5	5	5	5	5	85	<b>100</b>
<b>Realisasi</b>	6,31	5,69	5,69	6,00	6,00	91,74	<b>109,74</b>
<b>Capaian</b>	120,00	113,80	113,80	120,00	120,00	107,93	<b>109,74</b>

Sumber : Mandor

Capaian IKU atas persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah 120 dengan realisasi 88,80% karena didukung dengan inovasi pelayanan yang dilakukan yaitu kegiatan sosialisasi dengan basis wilayah dan sektor penerimaan pajak.

Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Seksi Pelayanan, KP2KP Nangapinoh, dan KP2KP Putussibau di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi serta Kabupaten Kapuas Hulu. Segmentasi kegiatan penyuluhan juga sangat beragam, antara lain bendahara desa, pengusaha, petani kebun (sawit), serta koperasi dan *Credit Union (CU)*.

Salah satu indikator keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV yang mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan DJP, tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan, dan tingkat efektivitas kehumasan perpajakan. Untuk indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan di KPP Pratama Sintang, indeks kepuasan pelayanan triwulan IV tahun 2024 91,71 dan indeks efektivitas penyuluhan 85,30 sehingga diperoleh realisasi IKU KPP tahun 2024 109,74.

## 5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif

Persentase pengawasan pembayaran masa							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	<b>90,00%</b>
<b>Realisasi</b>	90,00%	113,03%	113,03%	107,46%	107,46%	120,00%	<b>120,00%</b>
<b>Capaian</b>	100,00	120,00	120,00	119,40	119,40	120,00	120,00

Sumber : Mandor

Pengawasan pembayaran masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) yang dibagi menjadi Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis dan Pengawasan

pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Indeks capaian IKU persentase pengawasan pembayaran masa adalah 120, dengan realisasi 120,00% dari target 90,00 %.

Tantangan dalam pencapaian IKU ini adalah SP2DKE baru dapat diterbitkan di akhir bulan Februari 2024, data pemicu tidak tersedia atau tersedia tetapi munculnya agak lambat, dinamisasi baru dapat dilakukan setelah periode pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 berakhir, dan mayoritas WP UMKM sehingga omset triwulan I masih banyak yang di bawah 500 juta rupiah. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja yaitu melakukan mitigasi awal terhadap *timeline* dan alur penerbitan STP, melakukan evaluasi dan tindak lanjut berkala terhadap data pemicu dan penguji yang tersedia pada aplikasi Approweb, dan intruksi untuk segera menindaklanjuti STP yang telah terbit.

## 6. Pengujian kepatuhan material yang efektif

Pengujian kepatuhan material yang efektif merupakan pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Tujuan dari semua jenis pengawasan tersebut adalah bahwa dengan meningkatnya pengawasan yang dilakukan oleh AR terhadap wajib pajak melalui penerbitan himbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti dan efektivitas pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak diharapkan akan mendorong optimalisasi penerimaan pajak.

Capaian IKU Pengujian kepatuhan material yang efektif adalah sebagai berikut:

<b>Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan</b>							
<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Sm.1</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d. Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Yearly</b>
<b>Target</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	<b>100,00%</b>
<b>Realisasi</b>	100,00%	95,59%	95,59%	114,35%	114,35%	120,00%	<b>120,00%</b>
<b>Capaian</b>	100,00	95,59	95,59	114,35	114,35	120,00	<b>120,00</b>

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	<b>100,00%</b>
<b>Realisasi</b>	100,00%	116,55%	116,55%	118,58%	118,58%	120,00%	<b>120,00%</b>
<b>Capaian</b>	100,00	116,55	116,55	118,58	118,58	120,00	<b>120,00</b>
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>
<b>Realisasi</b>	104,00%	106%	106%	88,54%	88,54%	119,86%	<b>119,86%</b>
<b>Capaian</b>	104	106	106	89	89	120	<b>120</b>

Sumber : Mandor

Pencapaian penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 terdiri dari realisasi P4DK strategis dan realisasi P4DK kewilayahan. Dari capaian P4DK Strategis dan Kewilayahan didapat capaian IKU keseluruhan sebesar 120,00%. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target dari IKU ini adalah melakukan *mapping* terhadap Wajib Pajak yang akan diterbitkan LHPT dan SP2DK, membuat rencana kerja, timeline penerbitan LHPT dan SP2DK, dan kegiatan konseling, serta melakukan evaluasi periodik setiap minggu.

IKU selanjutnya persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 adalah sebesar 120% dari target sebesar 100% sehingga indeks capaiannya sebesar 120. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target dari IKU ini adalah melakukan mitigasi terkait penerbitan STP selain tahun berjalan, menginstruksikan kepada petugas untuk segera menindaklanjuti dafnom STP yang ada, serta melakukan pemantauan, tindak lanjut dan evaluasi secara berkala terhadap data.

Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah

dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah sebesar 119,86% dari target sebesar 100% sehingga indeks capaiannya sebesar 119,86. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target dari IKU ini adalah memaksimalkan koordinasi antar fungsi, mengelola komite kepatuhan secara efektif dan efisien, serta melaporkan tugas komite kepatuhan tepat waktu.

## 7. Penegakan hukum yang efektif

IKU penegakan hukum yang efektif berkaitan dengan aktivitas pemeriksaan dan penilaian, penagihan, serta penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan SKP yang kemudian dilakukan penagihan dan pemeriksaan sehubungan dengan SKP yang diterima Wajib Pajak. Pada tahun 2024, efektivitas pemeriksaan dan penilaian (120,00%) melebihi target yang telah ditetapkan (100%), efektivitas penagihan (115,53%) dari target yang ditetapkan (75%), dan persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (100,00%) sesuai target yang telah ditetapkan (100%).

Berikut ini capaian IKU Penegakan Hukum yang Efektif:

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>
<b>Realisasi</b>	72,00%	88,39%	88,39%	118,58%	118,58%	120,00%	<b>120,00%</b>
<b>Capaian</b>	72,00	88,39	88,39	118,58	118,58	120,00	<b>120,00</b>
Tingkat efektivitas penagihan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	75,00%	<b>75,00%</b>
<b>Realisasi</b>	33,40%	68,09%	68,09%	108,44%	108,44%	115,53%	<b>115,53%</b>
<b>Capaian</b>	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	<b>120,00</b>

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	<b>100,00%</b>
<b>Realisasi</b>	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	<b>100,00%</b>
<b>Capaian</b>	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	100,00	<b>100,00</b>

Sumber : Mandor

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter yaitu komponen tingkat efektivitas pemeriksaan dan komponen tingkat efektivitas penilaian. Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Masing masing dengan bobot 15% untuk SKP terbit tahun berjalan (Data Potensi DSPP 2024), 25% SKP terbit tahun berjalan (Nilai SKP Terbit Tahun Berjalan), 30% persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan, 25% persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan tepat waktu, dan 5% persentase ketetapan dibanding nilai restitusi.

Sedangkan tingkat efektivitas penilaian adalah kegiatan penilaian yang diukur berdasarkan variabel penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tahun 2024 mencapai 120,00% dari target yang ditentukan sebesar 100%.

Efektivitas penagihan terdiri dari beberapa tindakan penagihan antara lain Surat Teguran dengan realisasi 10.688 dari target 2.140 (capaian 120%), Surat Paksa dengan realisasi 6.647 dari target 1.750 (capaian 120%), Sita dengan realisasi 457 dari target 62 (capaian 120%), Blokir dengan realisasi 186 dari target 39 (capaian 120%), dan Penjualan Barang Sitaan dengan realisasi 12 dari target 11 (capaian 109%). Setiap poin memiliki pembobotan masing-masing sehingga didapatkan realisasi efektivitas penagihan sebesar 115,53%. Tantangan yang dihadapi terkait upaya pencapaian IKU ini adalah alamat dan nomor kontak Wajib Pajak tidak valid, tidak adanya mekanisme untuk mengetahui rekening Wajib Pajak sebelum dilakukan pemblokiran, dan administrasi penagihan PBB yang masih manual. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target IKU ini adalah mengirimkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang ketetapannya telah jatuh tempo, pemblokiran rekening berdasarkan data informasi rekening yang sebelumnya sudah dilakukan pemindahbukuan namun utang pajak yang diblokir belum lunas, dan melakukan

permintaan bantuan informasi mengenai transaksi keuangan Wajib Pajak kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan *Case Building* terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 adalah 100%.

## 8. Data dan Informasi yang Berkualitas

Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	<b>100,00%</b>
<b>Realisasi</b>	15,68%	97,60%	97,60%	120,00%	120,00%	120,00%	<b>120,00%</b>
<b>Capaian</b>	78,38	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	<b>120,00</b>
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	10%	25%	25%	40%	40%	55%	<b>55%</b>
<b>Realisasi</b>	60,00%	72,22%	72,22%	87,13%	87,13%	90,63%	<b>90,63%</b>
<b>Capaian</b>	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	<b>120,00</b>

Sumber : Mandor

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan

yang disusun oleh Pengamat berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan. Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan). Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah 120,00%.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023. Penghitungan IKU ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah dengan 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data. Realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP adalah 90,63%.

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah pemerintah daerah dalam memberikan data kurang responsif dan kurang lengkap serta penanggungjawab penyedia data dari pemerintah daerah sering berganti, sehingga pemahaman terkait pemberian data ILAP rendah. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai target IKU ini adalah melanjutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan KP2KP serta menindaklanjuti data ILAP yang kurang lengkap.

## 9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

<b>Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM</b>							
<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Sm.1</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d. Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Yearly</b>
<b>Target</b>	100,00	100	100	100	100	100	<b>100</b>
<b>Realisasi</b>	105,41	107,52	107,52	113,20	113,20	111,64	<b>111,64</b>
<b>Capaian</b>	105,41	107,52	107,52	113,20	113,20	111,64	<b>111,64</b>
<b>Indeks Penilaian Integritas Unit</b>							
<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Sm.1</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d. Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Yearly</b>
<b>Target</b>				85	85	85	<b>85</b>
<b>Realisasi</b>				100	100	97,69	<b>97,69</b>
<b>Capaian</b>				117,65	117,65	114,93	<b>114,93</b>
<b>Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko</b>							
<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Sm.1</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d. Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Yearly</b>
<b>Target</b>	23,00	47,00	47,00	70,00	70,00	90,00	<b>90,00</b>
<b>Realisasi</b>	46,68	71,29	71,29	83,09	83,09	98,01	<b>98,01</b>
<b>Capaian</b>	120,00	120,00	120,00	118,70	118,70	108,90	<b>108,90</b>

Sumber : Mandor

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM terdiri atas komponen Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek yaitu kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya, kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya, dan pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal. Realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM adalah 111,64.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target IKU ini adalah menghimbau seluruh pegawai untuk menyelesaikan 2 JP *elearning* Studia pada triwulan I, melaksanakan kegiatan kebintalan pada triwulan I minimal sebanyak 4 kali, melaksanakan pelaporan kegiatan kebintalan SDM sebelum batas waktu yang telah ditentukan, serta menyampaikan usulan pelatihan untuk pegawai dan pejabat.

Indeks Penilaian Integritas Unit mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak) yakni pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit adalah 97,69.

Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi, yang dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari tahun berikutnya. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko tahun 2024 adalah 98,01.

Pencapaian IKU ini tidak mengalami kendala yang besar sepanjang kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) direncanakan dengan baik sebelum batas waktu pelaksanaan DKO sehingga para peserta DKO dapat mengatur jadwal dan mempersiapkan bahan-

bahan rapat DKO yang diperlukan. Di samping itu, peran aktif peserta di dalam rapat DKO dengan memberikan usulan-usulan mitigasi risiko dan rencana aksi serta melaksanakan rencana aksi yang telah disepakati, secara langsung berdampak pada pencapaian target IKU lainnya karena di dalam rapat DKO dilakukan pembahasan atas seluruh IKU yang menjadi tanggung jawab KPP Pratama Sintang.

#### 10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Pelaksanaan anggaran memiliki peranan penting yang menjadikan setiap program maupun kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Penyerapan anggaran diharapkan dapat diimbangi dengan efisiensi penggunaan anggaran dan penghematan terutama dalam pengadaan barang dan jasa.

<b>Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran</b>							
<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Sm.1</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d. Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Yearly</b>
<b>Target</b>	100	100	100	100	100	100	<b>100</b>
<b>Realisasi</b>	71,56	94,85	94,85	98,14	98,14	120,00	<b>120,00</b>
<b>Capaian</b>	71,56	94,85	94,85	98,14	98,14	120,00	<b>120,00</b>

Sumber : Mandor

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran. Realisasi tahun 2024 adalah 120.

Tim Pengelola Keuangan KPP Pratama Sintang akan menyusun strategi serta melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin agar penyerapan anggaran dan efisiensi anggaran dapat berjalan beriringan sehingga bisa mendapatkan nilai PKPA yang maksimal.

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam usaha pencapaian IKU ini yakni terdapat kegiatan sehubungan dengan Belanja Modal (53) yang baru dilaksanakan di bulan Maret sehingga penyerapan yang direncanakan sehubungan dengan kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan, beberapa pegawai yang melaksanakan lembur tidak melakukan presensi sehingga uang lembur tidak dapat dicairkan, dan komponen (SK, Pembagian Target Penerimaan, dll) yang menjadi dasar penerbitan SPPD belum diterima oleh pegawai di awal tahun sehingga terdapat Kegiatan Perjalanan Dinas yang belum dapat dilaksanakan. Upaya yang dilakukan yakni melakukan Revisi RPD, membuat

monitoring penyerapan anggaran, dan mengingatkan pegawai yang lembur untuk selalu melakukan presensi.

## B. Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024.

Realisasi Belanja Negara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sintang (Termasuk KP2KP) pada TA 2024 adalah sebesar Rp14.646.514.743 atau 98,66% dari pagu belanja dalam DIPA sebesar Rp14.845.887.000.

**Tabel**  
**Realisasi Belanja KPP Pratama Sintang**  
**(dalam rupiah)**

<b>NO</b>	<b>JENIS BELANJA</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
1	BELANJA PEGAWAI	826.116.000	816.535.000	98,84%
2	BELANJA BARANG	6.928.903.000	6.743.843.740	97,33%
3	BELANJA MODAL	7.090.868.000	7.086.136.003	99,93%
<b>TOTAL</b>		<b>14.845.887.000</b>	<b>14.646.514.743</b>	<b>98,66%</b>

## C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka efisiensi anggaran dalam hal ini terkait perjalanan dinas, KPP Pratama Sintang telah menerbitkan Nota Dinas Nomor ND-1002/KPP.1306/2024 tanggal 14 November 2024 hal Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan KPP Pratama Sintang Tahun Anggaran 2024 untuk seluruh pegawai KPP Pratama Sintang. Dalam nota dinas tersebut memuat bahwa terhadap belanja perjalanan dinas akan dilakukan penghematan minimal 50% (lima puluh persen) dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024.

Dalam rangka menunjang kegiatan operasional KPP Pratama Sintang, maka penggunaan anggaran perjalanan dinas yang tersedia diutamakan untuk perjalanan dinas sehubungan dengan tugas dan fungsi utama masing-masing seksi. Setiap seksi yang akan melakukan perjalanan dinas dihimbau membuat agenda yang disesuaikan dengan pagu yang tersedia, mengurangi waktu atau jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas, mempertimbangkan pendelegasian tugas kepada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dalam bentuk permintaan bantuan, dan melakukan

penghematan biaya penginapan dengan cara berbagi kamar (*sharing*) dengan Pegawai lain yang melaksanakan perjalanan dinas ke tempat tujuan yang sama.

#### D. Kinerja Lain-Lain

Sebagai pelengkap, berikut ini disajikan daftar prestasi yang berhasil diraih oleh KPP Pratama Sintang selama tahun 2024:

##### 1. Tingkat Nasional

Pencapaian kinerja melebihi target penerimaan pajak tahun 2023

##### 2. Tingkat Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat

- a. KPP Pratama dengan capaian penerimaan di atas 100% sebanyak 4 kali
- b. Terbaik ke-1 Realisasi IKU Persentase Penyelesaian P4DK
- c. Terbaik ke-1 Pertumbuhan PKM Tertinggi
- d. Terbaik ke-1 *Success Rate* Daftar Prioritas Pengawasan Tertinggi
- e. Terbaik ke-1 Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan WP Kewilayahan Tertinggi (Agis Fauziatul Azizah)
- f. Terbaik ke-2 KPP dengan jumlah kemenangan Tertinggi di Tingkat Banding
- g. Terbaik ke-2 Realisasi PBB Tertinggi
- h. Terbaik ke-2 Persentase Realisasi PKM dan Efektivitas Tindakan Penagihan
- i. Terbaik ke-3 Pertumbuhan nilai SPPT PBB Tertinggi
- j. Juara 3 unit dengan Tingkat Penyampaian SPOP PBB Tertinggi
- k. Terbaik ke-3 Realisasi IKU Aktivitas PPM
- l. Terbaik ke-3 KPP dengan jumlah kesalahan Penerbitan STP paling rendah
- m. Terbaik ke-3 Capaian LHPDK-Ekstensifikasi Terbit NPWP Aktif Tertinggi (Dody Budi Prabowo)
- n. Terbaik Pertama Pegawai (Rachmat Hidayat) dengan Total Konten *Publish* Terbanyak di Portal DJP
- o. Terbaik Kedua Efektivitas IKU Kepuasan Pelayanan Tingkat KPP
- p. Terbaik Kedua Unit Kerja (KP2KP Nangapinoh) dengan Konten *Publish* Terbanyak Tingkat KP2KP
- q. Terbaik Ketiga Realisasi Kepatuhan SPT Tercepat Tingkat KPP
- r. Kepala KP2KP Terbaik Ketiga (Munawar Kholil, KP2KP Nangapinoh)
- s. Terbaik Ketiga Unit Kerja (KP2KP Putussibau) dengan Konten *Publish* Terbanyak
- t. Terbaik Ketiga Efektivitas Kegiatan Penyuluhan KP2KP Nangapinoh
- u. Terbaik Ketiga Tim Fungsional Penyuluh (Aulia Harnomo dan Fourtha Dipoyudantoro)
- v. Terbaik ketiga pegawai (Prima Ansari M.) dengan Konten *Publish* Terbanyak

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan membandingkan Perencanaan Kinerja dengan Capaian Kinerja Organisasi diketahui bahwa secara keseluruhan nilai CKO KPP Pratama Sintang adalah 108,61. IKU yang indeks capaiannya maksimal (120) yaitu Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, Persentase pengawasan pembayaran masa, Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan, Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian, Tingkat efektivitas penagihan, Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan, Persentase penghimpunan data regional dari ILAP, dan Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

Perbaikan supaya mencapai capaian yang lebih tinggi perlu dilakukan pada IKU yang realisasinya belum mencapai target yaitu Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas agar dapat mencapai nilai kinerja organisasi yang tinggi dan mencapai target penerimaan pajak yang diamanahkan kepada KPP Pratama Sintang.

#### **B. Langkah selanjutnya**

Langkah selanjutnya yang perlu diambil tetap harus mengacu pada dua sasaran utama organisasi yaitu Sasaran Penerimaan dan Sasaran Pendukung Penerimaan Pajak. Sasaran Penerimaan Pajak dengan mempertimbangkan capaian penerimaan pajak tahun 2024 dari jenis pajak, sektor penerimaan dan wilayah kabupaten memerlukan peningkatan fokus pengawasan pada Wajib Pajak di sektor P3 dan sektor-sektor yang terkait dengan perubahan sektor P3 dengan penekanan pada jenis pajak PPN dan PTLL serta PBB dan BPHTB. Pengawasan dilakukan melalui kegiatan penggalian potensi yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak sesuai dengan IKU yang terkait. Selain itu perluasan Wajib Pajak yang menjadi sasaran intensifikasi perpajakan perlu dilakukan sebagai cara untuk mengatasi turunnya penerimaan pajak.

Di samping kegiatan intensifikasi perpajakan tersebut, ekstensifikasi perpajakan juga tetap dilaksanakan untuk memperluas basis data Wajib Pajak dan potensi perpajakan dengan melakukan berbagai kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan *canvassing* Wajib Pajak. Melalui kegiatan ekstensifikasi tersebut diharapkan data potensi perpajakan yang diperoleh akan semakin lengkap dan akurat sehingga dapat digunakan untuk pengawasan Wajib Pajak yang lebih baik.

Sasaran Pendukung Penerimaan harus lebih menekankan capaian tiap perspektif khususnya *Learning and Growth Perspective*. Pembuatan rencana dan manajemen waktu jatuh tempo pengerjaan program kerja harus lebih ditingkatkan dengan meningkatkan pula komunikasi, koordinasi, dan sinergi antar unsur dalam KPP Pratama Sintang.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

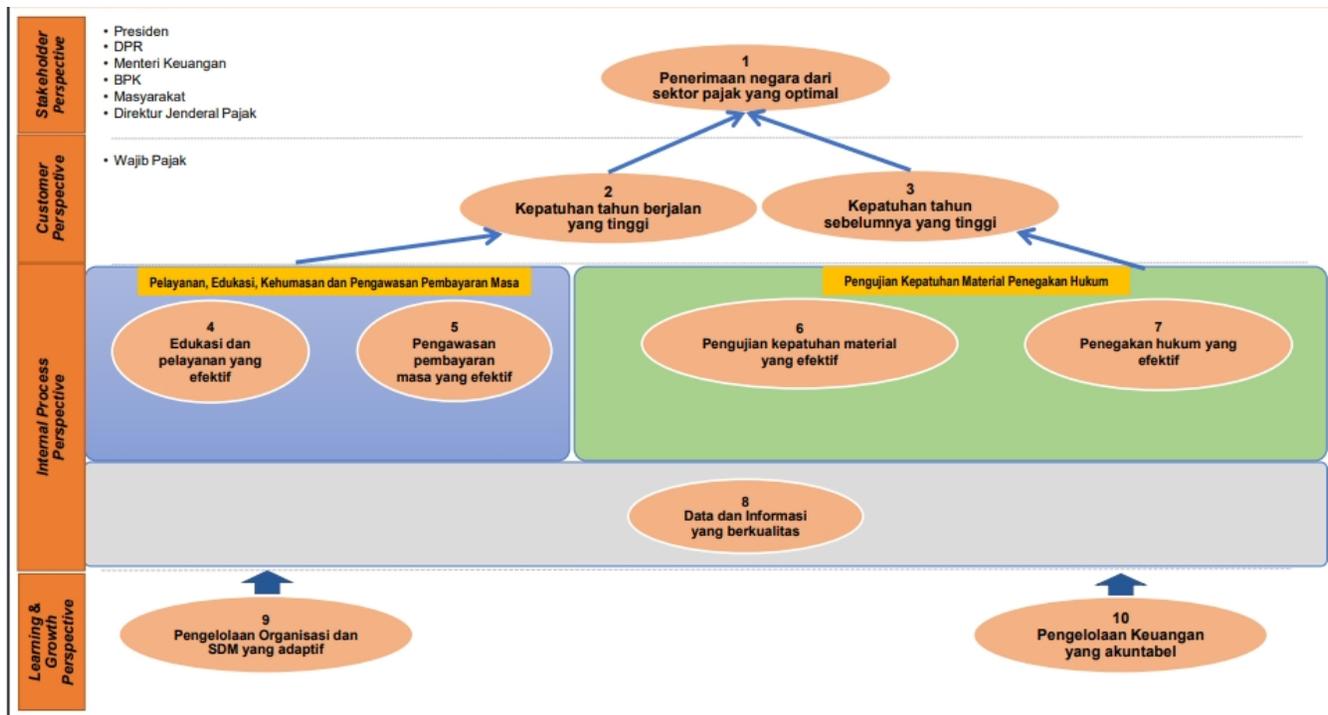
- A. Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Sintang Tahun 2024
- B. Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Sintang Tahun 2024
- C. Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Sintang Tahun 2023



**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-6/WPJ.13/2024**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINTANG**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KALIMANTAN BARAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

**Peta Strategi**

**Visi :**  
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINTANG  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN  
BARAT  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan Informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

**Program/ Kegiatan Tahun 2024**

**Anggaran**

**A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara**

**Rp 1.388.630.000**

- |                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| 1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara   | Rp 270.588.000 |
| 2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi | Rp 291.499.000 |
| 3. Pengawasan dan Penegakan Hukum     | Rp 826.543.000 |

**B. Program Dukungan Manajemen**

**Rp 13.561.210.000**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | Rp 12.631.141.000 |
| 2. Pengelolaan Organisasi dan SDM      | Rp 930.069.000    |

Sintang, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat,

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sintang,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Kurniawan Nizar



Ditandatangani Secara Elektronik  
S. Sentot Wardoyo



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINTANG  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN  
BARAT  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	21.08%	47.1%	47.1%	74.45%	74.45%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	21.08%	47.1%	47.1%	74.45%	74.45%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan Informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Sintang, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Sintang,



Ditandatangani Secara Elektronik  
S. Sentot Wardoyo



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINTANG**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN BARAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	1. Input Rencana Penerimaan Tahunan dan/atau sesuai perubahan, serta input prognosa bulanan 2. Menentukan dan melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak dengan cara sebagai berikut : a) Melakukan penggalan potensi tematik sektor unggulan sesuai dengan Prioritas Nasional dan Regional b) Menindaklanjuti DSP4 Rekomendasi	1. Melakukan input atas Rencana Penerimaan setiap tahun maupun jika ada perubahan dan prognosa setiap bulannya 2. Pencapaian penerimaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan 3. Pencapaian pertumbuhan pajak bruto	1. Melakukan pengumpulan data lapangan untuk Wajib Pajak yang ber-NPWP. 2. Penerbitan SP2DK dan tindak lanjut LHP2DK. 3. Pengawasan terhadap mobilitas perekonomian di wilayah Wajib Pajak. 4. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. 5. Tindak lanjut terhadap DSPC Kolaborasi 5. Konseling Wajib	1. Data pengujian dan data matching ditindaklanjuti; 2. DSPT, DSPE, DPP, DSPP, dan DSPC 3. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, Profil Wajib Pajak, data konkret, LHP2DK, pencapaian penerimaan.	Januari s.d. Desember	1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak 2. Seluruh eselon IV	14.949.840.000



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>Pajak.</p> <p>6. Melakukan penggalian potensi dari data lawan transaksi.</p> <p>7. Pengawasan terhadap kewajiban Wajib Pajak yang mengalami kenaikan dan penurunan, terutama sektor yang mengalami pertumbuhan.</p> <p>8. Melakukan penyelesaian SP2DK Outstanding.</p> <p>9. Mengawal WP Bendahara dalam melakukan penyetoran PPh dan memastikan pembayaran pajaknya.</p>				
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	1. Input Rencana Penerimaan Tahunan dan/atau sesuai perubahan, serta input prognosa bulanan 2. Meningkatkan Indeks realisasi	1. Melakukan input atas Rencana Penerimaan setiap tahun maupun jika ada perubahan dan prognosa setiap bulannya 2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan	Melakukan pemantauan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dan memastikan BUN mengetahui rencana penerimaan/pengeluaran kas dalam suatu	1. Persentase pemantauan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dan memastikan BUN	Januari s.d. Desember	Seksi Penjaminan Kualitas Data	14.949.840.000



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	kas tercapai 100% setiap triwulan	periode tertentu dalam rangka pengambilan keputusan pengelolaan kas.	mengetahui rencana penerimaan/pe ngeluaran kas dalam suatu periode tertentu dalam rangka pengambilan keputusan pengelolaan kas mencapai 100% setiap triwulan.			
3	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assignment WPS Tahun 2024</li> <li>2. Mapping Tingkat Kepatuhan WP</li> <li>3. WA Blast</li> <li>4. Komunikasi via Telepon</li> <li>5. Kunjungan Kerja dalam rangka TL WP Belum Laport SPT Tahunan</li> <li>6. Asistensi Pengisian SPT Tahunan</li> <li>7. Monitoring dan Evaluasi</li> <li>8. Peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencapaian Kepatuhan SPT Tahunan</li> <li>2. WPS terdistribusi proporsional</li> <li>3. Tabel Kepatuhan</li> <li>4. Pesan dibaca</li> <li>5. Komunikasi aktif, WP tereduksi</li> <li>6. WP dapat ditemui, tereduksi</li> <li>7. SPT Tahunan 2022 terlapor</li> <li>8. Solusi/Target Tercapai</li> <li>9. Koordinasi dengan Wajib Pajak Bendahara terdaftar untuk pembuatan Bukti Potong ASN</li> <li>10. Layanan Pajak di luar Kantor pada kecamatan-kecamatan yang terdaftar di Seksi Pengawasan V</li> <li>11. Melakukan pengiriman WA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian imbauan untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan.</li> <li>2. Memberikan konsultasi terkait pembuatan bukti potong kepada pemberi kerja.</li> <li>3. Mengingatkan kewajiban Wajib Pajak untuk lapor SPT Tahunan melalui WA Blast/Email Blast.</li> <li>4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait kolaborasi dalam peningkatan kepatuhan Wajib</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Imbauan</li> <li>2. Pelaporan SPT Tahunan, peningkatan pemahaman Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan yang benar dan tepat waktu.</li> <li>3. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, pencapaian tingkat kepatuhan SPT</li> </ol>	Januari s.d. Desember	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seksi Pelayanan</li> <li>2. Seksi Pengawasan I, II, III, IV dan V</li> </ol>	14.949.840.000



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		<p>Orang Pribadi Lainnya (Berbasis Kewilayahan)</p> <p>9. Menyusun KEP Tim Satgas SPT, KEP Tim Jejaring Sosial, Kep Tim Kelompok Penyuluh, Kep Tim Tenaga Penyuluh</p> <p>10. Identifikasi WP Laporan SPT Tahunan OP Tahun Pajak 2020 dan 2021</p> <p>11. Membuat Imbauan Pembuatan Bukti Potong Kepada Instansi Pemerintah</p> <p>12. Membuat Imbauan Pelaporan SPT Tahunan OP kepada Pemberi Kerja (WP Badan, Instansi Pemerintah Pusat, dan Instansi Pemerintah Daerah)</p> <p>13. Membuat Imbauan Permintaan Daftar Nominatif ASN dan PPPK Kepada Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah</p> <p>14. Koordinasi</p>	<p>Blast dan surat himbuan ke wajib pajak bendahara dan wajib pajak yang memiliki karyawan (misal WP Bank) untuk membuat bukti potong A1 / A2</p> <p>12. Terbit KEP Satgas SPT</p> <p>13. Dafnom Sasaran WP Laporan SPT</p> <p>14. Terbit Imbauan</p> <p>15. Rapat Kerjasama</p> <p>16. Pesan Tersampaikan</p> <p>17. WP Laporan</p> <p>18. NPWP Valid</p> <p>19. Identifikasi Kendala dan Capaian</p>	<p>Pajak.</p> <p>5. Melakukan penyuluhan dan memberikan asistensi dalam penyampaian SPT Tahunan WP Karyawan.</p> <p>6. Membentuk Satgas SPT Tahunan.</p> <p>7. Mengecek status pelaporan perpajakan sebelum memberikan pelayanan kepada WP.</p> <p>8. Tetap menyediakan sarana konsultasi terkait pelaporan SPT Tahunan baik melalui telepon, WA, maupun email.</p> <p>9. Melakukan penerbitan Surat Teguran.</p> <p>10. Memonitoring pelaksanaan kegiatan dan tingkat pelaporan SPT Tahunan WP Orang Pribadi dan Badan.</p>	<p>Tahunan Wajib Pajak.</p> <p>4. Peningkatan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan dan penyampaian SPT Tahunan dengan benar.</p>			



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		Pelaksanaan Sosialisasi Pembuatan Bukti Potong 1721-A2 dengan Pemerintah Daerah Kab. Sintang, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu 15. Imbauan Pelaporan SPT Tahunan melalui saluran WA Blast 16. Imbauan Pelaporan SPT Tahunan melalui saluran Media Sosial (Instagram, Facebook, dan Twitter) 17. Layanan Diluar Kantor untuk Pelaporan SPT Tahunan OP 18. Kelas Pajak Online tata cara Pelaporan SPT Tahunan OP Karyawan 19. Kelas Pajak Online tata cara Pelaporan SPT Tahunan OP Non-Karyawan						



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		20. Sosialisasi Pelaporan SPT Tahunan OP Dokter 21. Sosialisasi Pelaporan SPT Tahunan OP Dokter Gigi 22. Sosialisasi / Imbauan Pelaporan SPT Tahunan melalui saluran siaran Radio (RRI) dan IG Live 23. Pembuatan Video Testimoni FORKOMPIMDA 24. Imbauan Pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2022 25. Pekan Panutan Pelaporan SPT Tahunan OP FORKOMPIMDA 26. Sosialisasi Pemutakhiran Data Mandiri 27. Kelas Pajak Online Pemutakhiran Data Mandiri 28. Imbauan Pemutakhiran Data Mandiri melalui saluran WA Blast						



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		29. Imbauan Pemutakhiran Data Mandiri melalui saluran Media Sosial (Instagram dan Twitter) 30. Sosialisasi dan Kelas Pajak Pelaporan SPT Tahunan Badan kepada Asosiasi/Perkumpulan Pemberi Kerja / Organisasi 31. Layanan Pelaporan SPT Tahunan OP dan Badan di Helpdesk Monitoring dan Evaluasi						
4	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	1. 1.Penerbitan STP 2. 2.Tindak lanjut Data Perpajakan Tahun berjalan (matching Data) 3. Tindak lanjut Data DSPE 4. Membuat rekapitulasi pembayaran	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sesuai dengan target yang telah ditetapkan	1. Melakukan penerbitan STP sesuai daftar nominatif di Approweb 2. Melakukan pengawasan dan menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan yang muncul di Approweb	1. STP yang telah diterbitkan 2. Data pemicu yang telah ditindaklanjuti 3. Penerbitan NPWP 4. Tabelaris pemantauan pembayaran	Januari s.d. Desember	Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Kasi Pengawasan l s/d V	14.949.840.000



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		<p>Wajib Pajak per Masa Pajak dan per Jenis Pajak.</p> <p>5. Mengingatnkan Wajib Pajak pada H-3 dan hari H untuk menyetorkan pajaknya secara tepat waktu.</p> <p>6. Menerbitkan dan mengirimkan SP2DK Ekstensifikasi.</p> <p>7. Menyusun LHP2DK atas SP2DK yang telah diterbitkan.</p> <p>8. Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi</p>		<p>3. Membuat tabelaris pembayaran per masa, per jenis pajak, dan per AR</p> <p>4. Mengingatnkan WP pada hari H-3</p> <p>5. Membuat analisa penerimaan untuk Witholding/Pasal 25/ PS 22/PPN pada H+3 dengan memperhatikan taxgap dan data CRM IRE</p> <p>6. Dinamisasi angsuran pajak dalam tahun berjalan (angsuran PPh Pasal 25): a. berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi, b. berdasarkan hasil pemeriksaan, permohonan, atau upaya hukum (keberatan, banding, dan peninjauan kembali)</p> <p>7. Pengawasan fasilitas (jika terdapat WP yang</p>				



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				memanfaatkan fasilitas), misalnya SKB atau SKTD.				
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan data untuk usulan daftar DPP sebelum dilakukan pembahasan di komite kepatuhan untuk menghasilkan SP2DK dan LHP2DK yang berkualitas (kegiatan untuk triwulan 1 sd triwulan 4)</li> <li>2. Menyusun LHP2DK atas SP2DK DPP dan outstanding.</li> <li>3. Menyusun DSPT, DSPE, DSPP, DSPC dan DSPPn</li> </ol>	DSP4 Kolaborasi yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian DSP4 Rekomendasi oleh masing-masing Subkomite (DPP, DSPP, DSPC, DSPPn)</li> <li>2. Pembahasan DSP4 Rekomendasi dengan masing-masing Subkomite</li> <li>3. Menetapkan DSP4 Kolaborasi dengan mempertimbangkan trajectory dan pembahasam subkomite kepatuhan KPP</li> <li>4. Menerbitkan LHPT, SP2DK dan LHP2DK atas DPP</li> <li>5. Menerbitkan SP2 atas DSPP yang telah disetujui</li> <li>6. Melakukan tindakan penagihan aktif atas DSPC yang telah disetujui</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kertas Kerja Penelitian</li> <li>2. DSP4 Rekomendasi hasil pembahasan</li> <li>3. Potensi penerimaan pajak dari aktivitas PKM.</li> </ol>	Januari s.d. Desember	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seksi Pengawasan I, II, III, IV dan V</li> <li>2. Kepala Seksi P3</li> <li>3. FPP (SPV)</li> </ol>	14.949.840.000



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				7. Kertas kerja analisis dari tindak lanjut DSPPn				
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	1. Menyusun KEP Tim Kelompok Penyuluh 2. Menyusun KEP Tim Tenaga Penyuluh 3. Menyusun Rencana Kerja Penyuluhan di aplikasi Sisuluh 4. Menentukan Kegiatan dan Sasaran Penyuluhan 5. Menentukan WP Daftar Sasaran Penyuluhan terpilih (DSPT) dan DSPT Rekomendasi 6. Monitoring dan Evaluasi 7. Menentukan WP Daftar Sasaran Penyuluhan terpilih (DSPT) dan DSPT Rekomendasi	1. KEP Tim Kelompok Penyuluh 2. KEP Tim Tenaga Penyuluh 3. Rencana Kerja Inklusi Kesadaran Pajak Pelajar tingkat SD / SMK / Mahasiswa 4. Terbit NPWP 5. Peraturan Perpajakan / Sesuai Kebutuhan WP 6. Nota Dinas Usulan DSPT 7. Identifikasi Kendala dan Capaian	<b>Tema 1 :</b> <b>Meningkatkan Kesadaran Pajak</b> Melalui Pengetahuan Perpajakan a) Pajak Bertutur (Luring) b) Tax Goes To School (Luring) c.) Tax Goes To Campus (Luring)  <b>Tema 2 :</b> <b>Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Perpajakan</b> a) One To Many Luring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) b) Business	1. Kesadaran Wajib Pajak Meningkat 2. Terbit NPWP 3. Wajib Pajak tereduksi	Januari s.d. Desember	Seksi Pelayanan	14.949.840.000



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Development Services PKS (Pendampingan c) One to Many Luring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) d) One to Many Luring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) e) Penyuluhan melalui media audio visual (Siniar) f) Penyuluhan melalui media audio visual (Media Sosial) Tema III: Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Melalui Perubahan Perilaku: a. One on One (Luring) b. One to Many Luring (Kelas				



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar)				
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat Nota Dinas Permintaan Daftar Sasaran responden kepada seluruh Seksi dan KP2KP</li> <li>Identifikasi Dafnom Sasaran Responden</li> <li>Mengusulkan Nota Dinas Dafnom Sasaran Responden Ke Kanwil DJP Kalimantan Barat</li> <li>Identifikasi Kendala dan Capaian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nota Dinas</li> <li>Dafnom Tersedia</li> <li>Nota Dinas usulan Dafnom</li> <li>Identifikasi Kendala dan Capaian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat Nota Dinas Permintaan Daftar Sasaran responden kepada seluruh Seksi dan KP2KP</li> <li>Identifikasi Dafnom Sasaran Responden</li> <li>Mengusulkan Nota Dinas Dafnom Sasaran Responden Ke Kanwil DJP Kalimantan Barat</li> <li>Identifikasi Kendala dan Capaian</li> <li>Monitoring dan Evaluasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nota Dinas</li> <li>Dafnom Tersedia</li> <li>Nota Dinas usulan Dafnom</li> <li>Identifikasi Kendala dan Capaian</li> </ol>	Januari s.d. Desember	Seksi Pelayanan	14.949.840.000
8	Persentase pengawasan pembayaran masa	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan</li> <li>Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25</li> <li>Penelitian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dafnom selesai ditindaklanjuti</li> <li>Dafnom WP wajib angsuran PPh 25</li> <li>Surat Himbauan terbit dan kirim</li> <li>WP dapat ditemui, teredukasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan</li> <li>Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25</li> <li>Penelitian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dafnom selesai ditindaklanjuti</li> <li>Dafnom WP wajib angsuran PPh 25</li> <li>Surat</li> </ol>	Januari s.d. Desember	Seksi Pengawasan I, II, III, IV dan V	14.949.840.000



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		<p>pemenuhan kewajiban angsuran PPh 25</p> <p>4. Pembuatan himbauan melakukan setoran angsuran PPh 25</p> <p>5. Kunjungan kerja dalam rangka himbauan angsuran PPh 25</p> <p>6. Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan</p> <p>7. Kegiatan Asistensi WP Koperasi dan Pengepul TBS</p> <p>8. Analisa WP mengalami penurunan setoran</p> <p>9. Surat klarifikasi perihal penurunan setoran</p> <p>10. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>I. Surat Tagihan Pajak (STP)</p> <p>a. Penerbitan STP Triwulan I</p>	<p>5. Data Pemicu selesai ditindaklanjuti</p> <p>6. WP lapor SPT Masa PPN</p> <p>7. Dafnom WP potensial loss</p> <p>8. Surat klarifikasi terbit dan kirim</p> <p>9. Kendala dan Solusi/Target Tercapai</p> <p>10. Penerbitan STP dalam daftar nominasi aplikasi Approweb dan STP non daftar nominasi dalam aplikasi</p> <p>11. Penyusunan DSPE atas penambahan wajib pajak dan penerbitan SP2DK yang tercantum dalam DSPE hingga penerbitana NPWP baru</p> <p>12. Monitoring atas wajib pajak yang telah ditebitkan NPWP yang tercantum dalam daftar DSPE untuk melakukan pembayaran atas kegiatan usahanya</p>	<p>pemenuhan kewajiban angsuran PPh 25</p> <p>4. Pembuatan himbauan melakukan setoran angsuran PPh 25</p> <p>5. Kunjungan kerja dalam rangka himbauan angsuran PPh 25</p> <p>6. Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan</p> <p>7. Kegiatan Asistensi WP Koperasi dan Pengepul TBS</p> <p>8. Analisa WP mengalami penurunan setoran</p> <p>9. Surat klarifikasi perihal penurunan setoran</p> <p>10. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>I. Surat Tagihan Pajak (STP)</p> <p>c. Penerbitan STP Triwulan I</p> <p>d. Penerbitan STP Triwulan II</p> <p>e. Penerbitan STP Triwulan III</p>	<p>Himbau terbit dan kirim</p> <p>4. WP dapat ditemui, teredukasi</p> <p>5. Data Pemicu selesai ditindaklanjuti</p> <p>6. WP lapor SPT Masa PPN</p> <p>7. Dafnom WP potensial loss</p> <p>8. Surat klarifikasi terbit dan kirim</p> <p>9. Kendala dan Solusi/Target Tercapai</p> <p>10. Penerbitan STP dalam daftar nominasi aplikasi Approweb dan STP non daftar nominasi dalam aplikasi</p> <p>11. Penyusunan DSPE atas penambahan wajib pajak dan penerbitan SP2DK yang</p>			



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		b. Penerbitan STP Triwulan II g. Penerbitan STP Triwulan III h. Penerbitan STP Triwulan IV II. Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi a. Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) b. Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) yang melakukan pembayaran		f. Penerbitan STP Triwulan IV II. Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi c. Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) d. Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) yang melakukan pembayaran  III. Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan	tercantum dalam DSPE hingga penerbitan LHP2DK untuk penerbitan NPWP baru 12. Monitoring atas wajib pajak yang telah diterbitkan NPWP yang tercantum dalam daftar DSPE untuk melakukan pembayaran atas kegiatan usahanya			



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		III. Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan						
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	<p>1. Menyelesaikan SP2DK Non DPP Outstanding</p> <p>2. Menyelesaikan SP2DK DPP Outstanding :</p> <p>a) Pengiriman Undangan Konseling atas SP2DK Outstanding</p> <p>b) Pelaksanaan Konseling atas SP2DK atas Outstanding</p> <p>c) Kunjungan kerja atas tindak lanjut SP2DK Outstanding</p> <p>d) Penerbitan LHP2DK atas SP2DK Outstanding</p> <p>3. Memutakhirkan DPP</p> <p>4. Menerbitkan LHPT dan DPP</p> <p>5. Mengirim SP2DK atas DPP</p> <p>6. Menyelesaikan SP2DK atas DPP</p> <p>7. Profiling calon DPP</p> <p>8. Menyelesaikan</p>	<p>1. SP2DK Closed</p> <p>2. Undangan konseling dibaca WP</p> <p>3. WP hadir dan BA konseling terbit</p> <p>4. WP dapat ditemui, teredukasi</p> <p>5. LHP2DK atas DPP dan outstanding terbit</p> <p>6. BA DPP selesai</p> <p>7. LHPT DPP terbit semua</p> <p>8. SP2DK DPP terkirim dan dibaca WP</p> <p>9. Usulan DSPP disetujui</p> <p>10. Usulan IDLP disetujui</p> <p>11. Kendala dan Solusi/Target Tercapai</p>	<p>1. Penyelesaian SP2DK Non DPP Outstanding</p> <p>2. Penyelesaian SP2DK DPP</p> <p>3. Pemutakhiran DPP</p> <p>4. Penerbitan LHPT dan DPP</p> <p>5. Pengiriman SP2DK atas DPP</p> <p>6. Penyelesaian SP2DK atas DPP</p> <p>7. Profiling calon DPP</p> <p>8. Penyelesaian SP2DK Open</p> <p>9. Pengiriman usulan Pemeriksaan (DSPP)</p> <p>10. Pengiriman Usulan IDLP</p> <p>11. Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>1. SP2DK Closed</p> <p>2. Undangan konseling dibaca WP</p> <p>3. WP hadir dan BA konseling terbit</p> <p>4. WP dapat ditemui, teredukasi</p> <p>5. LHP2DK atas DPP dan outstanding terbit</p> <p>6. BA DPP selesai</p> <p>7. LHPT DPP terbit semua</p> <p>8. SP2DK DPP terkirim dan dibaca WP</p> <p>9. Usulan DSPP disetujui</p> <p>10. Usulan IDLP disetujui</p> <p>11. Kendala dan Solusi/Target Tercapai</p>	Januari s.d. Desember	Seksi Pengawasan I, II, III, IV dan V	14.949.840.000



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		SP2DK Open 9. Mengirimkan usulan Pemeriksaan (DSPP) 10. Mengirimkan Usulan IDLP 11. Melakukan monitoring dan Evaluasi						
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	Menerbitkan SP2DK dan LHPT yang berkualitas	Penerimaan PKM Tercapai	Menindaklanjuti data pemicu selain tahun berjalan	Data Pemicu selesai ditindaklanjuti	Januari s.d. Desember	Seksi Pengawasan I, II, III, IV dan V	14.949.840.000
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu	1. Meneliti DSP4 Rekomendasi 2. Menetapkan DSP4 Kolaborasi	1. DSP4 Kolaborasi 2. Tercapainya PKM Tahun Pajak 2024	8. Penelitian DSP4 Rekomendasi oleh masing-masing Subkomite 9. Pembahasan DSP4 Rekomendasi dengan masing-masing Subkomite 10. Menetapkan DSP4 Kolaborasi dengan mempertimbangkan trajectory dan pembahasam subkomite kepatuhan KPP	4. Kertas Kerja Penelitian 5. DSP4 Rekomendasi hasil pembahasan	Januari s.d. Desember	1. Seksi Pelayanan 2. Seksi PKD 3. Seksi Pengawasan I, II, III, IV dan V 4. Seksi P3 5. FPP (SPV)	14.949.840.000
12	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	1. Menerbitkan Surat Penunjukan Supervisor atas	1. Mengajukan usulan DSPP 2. Wajib Pajak prioritas dan kewilayahan	1. Melakukan pemeriksaan dan upaya hukum tindak	Meningkatkan kepercayaan stakeholder dan	Januari s.d. Desember	Seksi Penagihan, Penilaian	14.949.840.000



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Menerbitkan SP2 atas usulan pemeriksaan yang telah terbit NP2 dan peneribitan No LHP atas LHP yang telah selesai</li> <li>3. Mengajukan usulan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan Wajib Pajak Prioritas dan Kewilayahan</li> <li>4. Menyusun Daftar Prioritas Pengawasan tahun 2024</li> <li>5. Generate NP2 Pada Portal P2 atas usulan Pemeriksaan Data Konkret</li> <li>6. Penyelesaian Pemeriksaan Tujuan Lain</li> <li>7. Menyusun pelaporan Transfer Pricing dan Sasaran</li> </ul>	3. Optimalisasi kegiatan pemeriksaan di wilayah kerja KPP	<p>pidana di bidang perpajakan yang dilakukan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP</p> <p>2. Menyelesaikan pemeriksaan tujuan lain</p>	kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas tindakan pemeriksaan		danPemeriksaan	



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		Pendampingan Transfer Pricing 8. Penyampaian Usulan Usulan Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan IDLP 9. Pelaksanaan Pemeriksaan sesuai prosedur dan tepat waktu.						
13.	Tingkat efektivitas penagihan	1. Menerbitkan Surat Teguran 2. Menyampaikan Surat Paksa 3. Memblokir rekening WP 4. Melakukan Penyitaan 5. Melakukan Pbk Rekening WP 6. Mengajukan Lelang 7. Mengusulkan Gelar Perkara Pencegahan 8. Menyampaikan Laporan Penjagaan Piutang Pajak akan Daluwarsa kepada Kepala Kantor 9. Melakukan aset tracing atas Wajib Pajak dan/atau	Penegakan hukum yang efektif melalui optimalisasi kegiatan penagihan	1. Pemutakhiran data Wajib Pajak di Masterfile 2. Menghubungi Wajib Pajak melalui telepon/ aplikasi Whatsapp agar dapat bertemu secara langsung dan SP dapat disampaikan 3. Mengajukan permohonan permintaan data nomor rekening Wajib Pajak ke Kanwil DJP Kalimantan Barat, dan penelitian melalui aplikasi Pegasus 4. Melakukan Upaya Profiling baik dari Internal KPP Pratama Sintang maupun dengan Permintaan	Tindakan hukum penagihan berupa penyampaian surta teguran, surat paksa, pemblokiran, sita, dan pemindahbukuan dapat terlaksana dengan baik/optimal	Januari s.d. Desember	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	14.949.840.000



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		Penanggung Pajak		<p>Bantuan Profiling ke Kanwil DJP Kalimantan Barat di Seksi Intelijen</p> <p>5. Menghubungi dan mendorong Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak melalui mekanisme Pemindahbukuan Rekening</p> <p>6. Mempelajari langkah-langkah dalam mengajukan permohonan penilaian ke KPKNL Pontianak dan proses lelang</p> <p>7. Kelengkapan Dokumen Usul Gelar Perkara bisa didapatkan dari data LIIP Kanwil DJP Kalimantan Barat, atau dari Pihak ketiga (Kemenkumham, Imigrasi, Bea Cukai, dsb)</p> <p>8. Melakukan koordinasi dan permintaan data ke Seksi terkait dan/atau unit kerja lain di luar KPP Pratama Sintang</p> <p>9. Melakukan</p>				



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				koordinasi dan permintaan data ke internal kantor dan/atau ke pihak ketiga, serta permintaan profiling Wajib Pajak kepada Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat				
14.	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	Identifikasi LHP2DK dengan simpulan dan rekomendasi usulan pemeriksaan khusus yang memiliki indikasi tindak pidana perpajakan untuk dibahas pada rapat Subkomite Pemeriksaan dan Penilaian.	Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan	Identifikasi WP pada CRM IRE dengan transaksi yang memiliki indikasi tindak pidana perpajakan (misalnya TBTS, pungut tidak setor dll)	Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan melalui jalur RBP ( <b>Relevant Business Process</b> ) untuk dapat dilakukan pengembangan dan analisis oleh Kanwil.	Januari s.d. Desember	Kepala Seksi Pengawasan; Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan; Fungsional Pemeriksa Pajak yang tergabung dalam Komite Kepatuhan	14.949.840.000
15.	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	1. Kegiatan administrasi KPDL 2. Monitoring dan Evaluasi 3. Melakukan	1. Alket berkualitas 2. Alket disetujui 3. Kendala dan Solusi/Target Tercapai	1. Melakukan Penelitian atas Pengecer LPG dari daftar WP Agen LPG 2. Melakukan penelitian dari pembelian rumah dari	Ketersediaan data KPDL	Januari s.d. Desember	Kepala Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V	14.949.840.000



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) dengan menghasilkan data yang berkualitas.		wp bidang Real Estate 3. Melakukan penelitian dari pembelian mobil baru dari wp bidang Otomotif				
16.	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP *)	1. Pengolahan, penyajian, dan pendistribusian data yang disajikan dalam bentuk laporan untuk mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak. 2. Melakukan validasi data potensi 3. Pengolahan, Penyajian, dan penyampaian laporan monografi fiskal tentang aspek dan potensi perpajakan yang ada dalam wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan dibuat oleh KPP setahun sekali sesuai dengan bentuk yang ditentukan berdasarkan SE-	1. Membuat laporan yang berisi informasi data pembayaran Wajib Pajak, data Wajib Pajak Laport SPT, data kepemilikan kendaraan bermotor, data transaksi pengalihan tanah/bangunan, data faktur pajak 00, data WP tidak melakukan pembayaran terdapat data pihakke-3, omzet, Data LPSE, dan sebagainya. 2. Menyediakan data potensi yang berasal dari faktur pajak 00 untuk dicocokkan di lapangan, koordinasi dengan seksi terkait sehingga persetujuannya tepat waktu. Melakukan distribusi data KPDL ke seksi terkait paling lambat H+1 3. Membuat laporan yang berisi tentang gambaran umum tentang keadaan suatu wilayah dan antar wilayah yang dapat	Melakukan permintaan Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:  1. Data Sektor Properti yang meliputi namun tidak terbatas pada jenis data:  a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);  b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);	Tersedianya Data ILAP	Januari s.d. Desember	Seksi Penjaminan Kualitas Data	14.949.840.000



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		1/PJ.22/2003.	mempengaruhi perkembangan ekonomi, dengan tetap memperhatikan kemungkinan yang mempengaruhinya	c) Data Tanah dan/atau Bangunan; dan d) Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).  2. Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.				
17.	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	meningkatkan kompetensi teknis melalui IHT dan diklat agar probabilitas lulus uji kompetensi manajerial pegawai bisa maksimal	Kelulusan Ujian Kompetensi Teknis dan Assesment Center	1. Assessment Center bagi Pejabat Eselon III dan IV 2. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024 3. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024 4. Menyelenggarakan IHT secara rutin (Rabu Ngilmu) 5. Mengikuti Pembelajaran pada KLC atau StudiA	1. JPM $\geq$ 80% 2. Pegawai lulus pada Uji Kompetensi Teknis	Januari s.d. Desember	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	14.949.840.000



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				secara daring				
18.	Indeks Penilaian Integritas Unit	Menentukan Wajib Pajak sebagai calon responden	Partisipasi responden yang tinggi	Pemilihan Wajib Pajak yang lebih valid datanya terkait nomor telepon, email, contac person, dll (SPIU Tahun 2024 di bulan Desember)	Jumlah responden yang mengisi survei sesuai target	Januari s.d. Desember	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	14.949.840.000
19.	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	Pengelolaan kinerja organisasi dan mitigasi risiko sehingga dapat meminimalkan terjadinya risiko dan dampak risiko yang ditimbulkannya	DKO dan Manajemen Risiko dilaksanakan secara efektif	Secara rutin tiap bulan menyampaikan laporan NKO supaya bisa diketahui IKU-IKU mana saja yang masih kurang dan segera dipenuhi	Laporan NKO dan Manajemen Risiko	Januari sd. Desember	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	14.949.840.000
20.	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	semua indikator dapat IKPA dapat terpenuhi yakni dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi	Persentase Capaian PKPA Optimal	koordinasi dengan seluruh stakeholder DIPA seperti KPA, PPK, PBJ, bendahara, dan pelaksana BMN/ rumah tangga	Nilai IKPA menjadi Optimal	Januari sd. Desember	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	14.949.840.000



Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sintang,



Ditandatangani Secara Elektronik  
S. Sentot Wardoyo



SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	S. Sentot Wardoyo, S.S.T.	NAMA	Kurniawan Nizar	
NIP	198012102001121001	NIP	196604291993101001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina, IV/a	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sintang	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
2.	(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Barat)	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Barat)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan
4.		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang	100%	Penerima Layanan



5.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Barat)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
6.	Edukasi dan pelayanan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Barat)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
7.		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
8.	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Barat)	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	Proses Bisnis
9.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Barat)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
10.		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis
11.		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
12.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Barat)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan penilaian	100%	Proses Bisnis
13.		Tingkat efektivitas penagihan	75%	Proses Bisnis
14.		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
15.		Data dan Informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor	Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%



16.	Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Barat)	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
17.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Barat)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
18.		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
19.		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
20.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Barat)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran

#### B. TAMBAHAN

#### PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>



PERILAKU KERJA		
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	



PERILAKU KERJA

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

31 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,

Pegawa



Ditandatangani secara elektronik

S. Sentot Wardoyo  
198012102001121001

Ditandatangani secara elektronik

Kurniawan Nizar  
196604291993101001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	74 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
No	IKI	Target							
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	



1	Persentase realisasi penerimaan pajak	21,08%	47.10%	47.10%	74,45%	74,45%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	21,08%	47.10%	47.10%	74,45%	74,45%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
<b>KONSEKUENSI</b>								
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.							



2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
----	---

31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

S. Sentot Wardoyo

198012102001121001

Ditandatangani secara elektronik

Kurniawan Nizar

196604291993101001



**NILAI KINERJA ORGANISASI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT  
KPP PRATAMA SINTANG  
S.D. TRIWULAN IV 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	97,77
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							97,77
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,37%	Max	E/L	26%	57,78%	100,37
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	94,22	Max	P/L	19%	42,22%	94,22
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	104,60
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							108,65
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,35%	Max	E/L	26%	57,78%	100,35
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	120,85%	Max	P/L	19%	42,22%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,56
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,56%	Max	E/M	21%	100,00%	100,56
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	117,50
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,87
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,74%	Max	E/M	21%	50,00%	109,74
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,95
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	119,86%	Max	P/M	14%	33,33%	119,86
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69

7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	115,53%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	90,63%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>							25,00%	115,91
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,82
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	111,64	Max	P/M	14%	33,33%	111,64
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	97,69	Max	P/M	14%	33,33%	114,93
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,01	Max	P/M	14%	33,33%	108,90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>								<b>108,61</b>

Sintang, 24 Januari 2025

Mengetahui  
Kepala Kantor,



Ditandatangani Secara Elektronik  
S. Sentot Wardoyo  
NIP 198012102001121001

Administrator Kinerja Organisasi,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Suminah  
NIP 197301141994022001



**RINCIAN LAPORAN NILAI KINERJA ORGANISASI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT**  
**KPP PRATAMA SINTANG**  
**S.D. TRIWULAN IV 2024**

KODE IKU	NAMA IKU	FORMULA IKU	TARGET		REALISASI		GAP
			%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$	100,00%	1.132.483.004.000	100,37%	1.136.683.003.865	0,37%
				1.132.483.004.000		1.132.483.004.000	
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	$(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$	100	-	94,22	-	-5,78
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$	100,00%	1.038.566.182.000	100,35%	1.042.198.561.209	0,35%
				1.038.566.182.000		1.038.566.182.000	
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	$\left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + (\text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT})}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$	100,00%	58890	120,85%	71169	20,85%
				58890		58890	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$	100,00%	93.916.822.000	100,56%	94.443.442.656	0,56%
				93.916.822.000		93.916.822.000	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$	74,00%	-	88,80%	-	14,80%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	Indeks Hasil Survei	100,00%	-	109,74%	-	9,74%
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	$(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$	90,00%	-	120,00%	-	30,00%
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	$(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$	100,00%	-	120,00%	-	20,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	$\frac{(\text{Capaian pemanfaatan data STP}) + (\text{Capaian pemanfaatan Data Matching})}{2} \times 100\%$	100,00%	-	120,00%	-	20,00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan	100,00%	-	119,86%	-	19,86%
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	$(\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) + (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%)$	100,00%	-	120,00%	-	20,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$	75,00%	-	115,53%	-	40,53%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$	100,00%	1	100,00%	0	0,00%
				1		1	
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$	100,00%	-	120,00%	-	20,00%

8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	$\left[70\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%\right)\right]$ $+$ $\left[30\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%\right)\right]$	55,00%	-	90,63%	-	35,63%																					
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)	100	-	111,64	-	11,64																					
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi	85,00	-	97,69	-	12,69																					
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko	90	-	98,01	-	8,01																					
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	<p>Triwulan1 s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)</p> <p>Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indeks Tw IV</th> <th>Formula Konversi Tw IV</th> <th>Kriteria Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>120</td> <td>120</td> <td>Realisasi IKKPA &gt; 95,00</td> </tr> <tr> <td>100 &lt; X &lt; 120</td> <td>100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **</td> <td>(91,00 &lt; Realisasi IKKPA &lt; 95,00)</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>100</td> <td>Realisasi IKKPA = 91,00</td> </tr> <tr> <td>80 &lt; X &lt; 100</td> <td>80 + (Realisasi IKKPA - 80) : 0,55 *</td> <td>(80,00 &lt; Realisasi IKKPA &lt; 91,00)</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>80</td> <td>Realisasi IKKPA = 80,00</td> </tr> <tr> <td>79,9</td> <td>79,9</td> <td>Realisasi IKKPA &lt; 80,00</td> </tr> </tbody> </table>	Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks	120	120	Realisasi IKKPA > 95,00	100 < X < 120	100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **	(91,00 < Realisasi IKKPA < 95,00)	100	100	Realisasi IKKPA = 91,00	80 < X < 100	80 + (Realisasi IKKPA - 80) : 0,55 *	(80,00 < Realisasi IKKPA < 91,00)	80	80	Realisasi IKKPA = 80,00	79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00	100	-	120,00	-	20,00
Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks																										
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00																										
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **	(91,00 < Realisasi IKKPA < 95,00)																										
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00																										
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKKPA - 80) : 0,55 *	(80,00 < Realisasi IKKPA < 91,00)																										
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00																										
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00																										

Sintang, 24 Januari 2025

Mengetahui  
Kepala Kantor,

Administrator Kinerja Organisasi,



Ditandatangani Secara Elektronik  
S. Sentot Wardoyo  
NIP 198012102001121001



Ditandatangani Secara Elektronik  
Suminah  
NIP 197301141994022001



**NILAI KINERJA ORGANISASI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT  
KPP PRATAMA SINTANG  
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<b>Stakeholder Perspective</b>								
							<b>30,00%</b>	
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							105,59
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	105,94%	Max	E/L	26%	50,00%	105,94
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	105,24	Max	E/L	26%	50,00%	105,24
<b>Customer Perspective</b>								
							<b>20,00%</b>	
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							79,63
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	101,77%	Max	P/L	19%	42,22%	108,93
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	114,17%	Max	E/L	26%	57,78%	114,17
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							50,33
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	50,33%	Max	E/M	21%	100,00%	50,33
<b>Internal Process Perspective</b>								
							<b>25,00%</b>	
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							118,48
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70,00%	120,00%	Max	P/M	14%	40,00%	112,41
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	81,00	86,95	Max	E/M	21%	60,00%	107,35
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	119,10%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							120,00
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	50,00%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	124,76%	Max	P/M	14%	50,00%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan	80,00%	103,79%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	97,76%			19%	36,54%	120,00



7c-N	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	80,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	164,44%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
Learning & Growth Perspective								25,00%
9	SDM yang kompeten							110,12
9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi*)	82,00%	96,00%	Max	P/M	14%	100,00%	117,07
10	Organisasi yang berkinerja tinggi							112,90
10a-CP	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	97,49	Max	P/M	14%	50,00%	114,69
10b-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	90,00%	100,00%	Max	P/M	14%	50,00%	111,11
11	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal							100,37
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	100,37	Max	P/M	14%	100,00%	100,37
Nilai Kinerja Organisasi								104,75

Sintang, 5 Januari 2024

Mengetahui  
 Pih Kepala Kantor,  
  
 Suminah  
 NIP. 197301141994022001

Administrator Kinerja Organisasi,

  
 Suminah  
 NIP. 197301141994022001

RINCIAN LAPORAN NILAI KINERJA ORGANISASI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT  
KPP PRATAMA SINTANG  
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023

KODE IKU	NAMA IKU	FORMULA IKU	TARGET		REALISASI		GAP
			%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$	100,00%	1.029.948.122.000	105,94%	1.091.090.162.709	5,94%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	$(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas})$	100	100	105,24	105,24	5,24
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	$\frac{\text{Jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2022 dari WP Badan dan Orang Pribadi}}{\text{Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh}} \times 100\%$	100,00%	50.080	101,77%	50.965	1,77%
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$	100,00%	897.095.656.000	114,17%	1.024.223.847.523	14,17%
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$	100,00%	132.852.466.000	50,33%	66.866.315.186	-49,67%
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	$\text{IKU EP} = \{(30\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (40\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$	70,00%	70	120,00%	120	50,00%
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	Indeks Hasil Survei	81	81	86,95	87	5,95
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	$(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)})$	90,00%	90	119,10%	119,10	29,10%
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	$(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)})$	100,00%	100	120,00%	120	20,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	$(\text{Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP}) \times 100\%$	100,00%	100	124,76%	124,76	24,76%
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan	$(15\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP}) + (25\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan}) + (30\% \times \text{Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan}) + (25\% \times \text{Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu}) + (5\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP Terbit dibanding dengan Nilai Restitusi})$	80,00%	80	103,79%	103,79	23,79%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (30\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (20\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$	75,00%	75	97,76%	97,76	22,76%
7c-N	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan yang disetujui Komite Pusat}}{\text{Jumlah tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan yang dibahas di Komite Pusat}} \times 100\%$	80,00%	4	100,00%	5	20,00%
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan		100,00%	630	164,44%	1036	64,44%

8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	$\times 60\% + (\dots \times 40\%)$	40,00%	19,2	100,00%	48	60,00%
9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi*)	(Persentase Pejabat Struktural yang memenuhi standar kompetensi X 60%) + (Persentase Pejabat Fungsional dan Pelaksana Umum yang memenuhi standar kompetensi) X 40%	82,00%	82	96,00%	96	14,00%
10a-CP	Indeks Penilaian Integritas Unit	((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi	85	85	97,49	97,49	12,49
10b-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	(50% x Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi) + (50% x Persentase Efektivitas Proses Manajemen Risiko UPR)	90,00%	90	100,00%	100	10,00%
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Capaian IKU PKPA Triwulan I = Capaian IKPA Januari s.d. Maret Capaian IKU PKPA Triwulan II = Capaian IKPA Januari s.d. Juni Capaian IKU PKPA Triwulan III = Capaian IKPA Januari s.d. September Capaian IKU PKPA Triwulan IV = 40% Capaian IKPA Januari s.d. Desember - 60% Capaian SMART  Capaian IKPA = $[\% \text{ Revisi DIPA} \times 5\% + \% \text{ Deviasi Halaman III DIPA} \times 5\% + (\% \text{ Pagi Minit} \times 5\% - \% \text{ Penyampaian Data Kontrol} \times 15\%)] +$ $[\% \text{ Pengelolaan LP dan TUP} \times 8\% - \% \text{ Penyempitan LRU Bendahara} \times 5\% + \% \text{ Penyampaian Dispensasi SPM} \times 5\% +$ $(\% \text{ Penyelenggaraan Anggaran} \times 15\% + \% \text{ Penyelaksanaan Tagihan} \times 12\% + \% \text{ Konfirmasi Capaian Output} \times 10\%)] +$ $(\% \text{ Pener SP2D} \times 5\% + \% \text{ Pengembalian/Kesalahan SPM} \times 5\% - \% \text{ Perencanaan Kas} \times 5\%)$	100,00	100	100,37	100,37	0,37
				100		100	



Mengetahui  
 Pih. Kepala Kantor  
 Suminah  
 NIP 197301141994022001

Sintang, 5 Januari 2024

Administrator Kinerja Organisasi,

Suminah  
 NIP 197301141994022001